

Pelaksanaan Pemekaran Daerah Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci dan Dampaknya terhadap Wilayah Pinggiran Kota Sungai Penuh

Implementation of Sungai Penuh City Extension from Kerinci Regency and Its Impact on Sungai Penuh City Periphery Area

Adryan^{1*}, Erwin² & Jafrinur³

¹Jurusan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Fakultas Pascasarjana, Universitas Andalas, Kota Padang 25163; ²Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Kota Padang 25163;

³Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Andalas, Kota Padang 25163;

*Penulis korespondensi. *e-mail*: adryannofri60@gmail.com

(Diterima: 19 Juli 2018; Disetujui: 2 Oktober 2018)

ABSTRACT

Law Number 32 Year 2004 on Regional Government article 4 stated that the formation of regions could be in the form of merging or splitting one area into two or more regions. The implementation of the splitting or extension will effect the improvement of community welfare, acceleration of public services, and management of regional potential. This study is aimed (1) to describe the consideration of Sungai Penuh City extension from Kerinci Regency; (2) to analyze the influences of city extension in increasing economic growth and potential development of Sungai Penuh City Area; and (3) to understand the impact of city extension on development of Sungai Penuh periphery area. This study conducts case study research with using qualitative and quantitative method, and determines informant using purposive sampling technique. Qualitative analysis is used to achieve the first and the third research purpose, and quantitative analysis is used to achieve the second research purpose. Results stated that the implementation of Sungai Penuh City extension is implemented by considering physical condition, regional function, economy, and social community. Economic growth of Sungai Penuh City after city extension increased 3.13% during 2010 to 2016. The economic growth was also supported by the increase of Human Development Index. The trade sector becomes a potential sector to be developed in Sungai Penuh City. City economic growth has an impact on development of its periphery area through the availability and accessibility of educational, health and agricultural infrastructure.

Keywords : city extension , regional autonomy, regional development, Sungai Penuh City

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 4 menyatakan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan atau pemekaran satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pelaksanaan pemekaran wilayah memberikan dampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat, percepatan pelayanan publik dan pengelolaan potensi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan pertimbangan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci; (2) menganalisis pengaruh pemekaran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi wilayah Kota Sungai Penuh; dan (3) memahami dampak pemekaran terhadap pembangunan wilayah pinggiran Kota Sungai Penuh. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, penentuan

informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Untuk mencapai tujuan penelitian pertama dan ketiga digunakan analisis kualitatif dan untuk mencapai tujuan penelitian kedua digunakan analisis kuantitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pemekaran Kota Sungai Penuh dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan fisik, fungsi wilayah, ekonomi, dan sosial masyarakat. Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh setelah pemekaran sebesar 3.13% selama tahun 2010-2016, peningkatan ekonomi tersebut juga didukung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Sektor perdagangan menjadi sektor yang potensial untuk dikembangkan di Kota Sungai Penuh. Pertumbuhan ekonomi Kota memberikan dampak terhadap pembangunan wilayah pinggiran Kota Sungai Penuh dengan tersedianya dan kemudahan akses sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan bidang pertanian.

Kata kunci: otonomi daerah, pembangunan daerah, pemekaran daerah, Kota Sungai Penuh

PENDAHULUAN

Reformasi pada tahun 1998 menjadi era baru dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Perubahan pelaksanaan pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Sistem sentralisasi yang semua kekuasaan terpusat berubah menjadi sistem desentralisasi dengan melimpahkan sebagian wewenang, kekuasaan dan tanggungjawab kepada daerah. Hal tersebut dikarenakan sistem sentralisasi yang terjadi mengakibatkan pengelolaan kekayaan daerah yang seharusnya dapat dinikmati oleh daerah namun ditarik kepusat.

Dengan diambilnya semua hasil pengelolaan kekayaan daerah oleh pusat mengakibatkan terjadinya ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sumber daya alam di Indonesia yang tidak merata, juga merupakan salah satu penyebab diperlukannya suatu sistem pemerintahan yang memudahkan pengelolaan sumber daya alam yang merupakan sumber pendapatan daerah sekaligus menjadi pendapatan nasional (Trisnawati, 2015).

Oleh karena itu untuk mengatasi masalah yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi menjadi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Polkitang, 2013).

Pelaksanaan otonomi daerah memungkinkan daerah-daerah untuk dapat mengelola sumberdaya nasional yang ada di daerah untuk kepentingan daerah. Pengelolaan kekayaan atau sumberdaya daerah tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan memelihara sumber daya nasional yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Hakim, 2017).

Setelah dikeluarkannya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi, sebagian besar daerah banyak yang menginginkan untuk dilaksanakannya pemekaran daerah. Pelaksanaan pemekaran daerah di era otonomi daerah pada saat ini memiliki daya tarik tersendiri di tengah masyarakat, dan terus menjadi pembicaraan disemua kalangan. Kuatnya wacana tersebut juga semakin menguatkan kontroversi dan perdebatan antar elit, kelompok masyarakat bahkan pembuat kebijakan sekalipun (Wahyun,2013).

Pemekaran daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, meningkatkan perekonomian daerah, peningkatan pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan pelaksanaan pemekaran tersebut sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Pasal 2 Tahun 2000. (Ayu, 2012).

Pemekaran adalah pemisahan atau memecahkan suatu bagian yang awalnya utuh menjadi beberapa bagian yang dapat berdiri sendiri atau masing-masing dapat berjalan sendiri (Poerwadarminta, 2005). Dalam pelaksanaan pemekaran wilayah pemerintah harus memperhatikan pembagian sumber daya antara daerah induk dan daerah pemekaran agar setelah terjadinya pemekaran tidak terjadi ketimpangan antar wilayah yang dimekarkan. (Harmantyo, 2007).

Tingkat kesejahteraan ekonomi suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari pendapatan masyarakat yang diukur dengan nilai PDRB per kapita. Daerah yang lebih sejahtera umumnya memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagikan nilai PDRB daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut (Neti, 2016).

Pelaksanaan otonomi daerah adalah salah satu cara untuk memberdayakan pembangunan di daerah. Daerah diharapkan dapat kreatif dan inovatif dalam mengembangkan daerahnya. Dan ketergantungan dari daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang. Dampak yang ditimbulkan oleh otonomi daerah adalah pelayanan menjadi lebih maksimal baik dalam hal penyediaan jasa ataupun sarana dan prasarana publik (Arrafat, 2011).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah (Nugroho dan Dahuri, 2004), yaitu:

1. Keunggulan Komparatif, yang pada poin ini sangat erat kaitannya dengan penggunaan sumber daya yang ada untuk digunakan tetapi sangat sulit untuk digerakkan atau digunakan. Hal tersebut dikarenakan oleh kondisi lokal yang mengikat seperti iklim dan budaya.
2. Aglomerasi, yang pada poin ini sangat berpengaruh pada kegiatan ekonomi baik itu peningkatan ekonomi secara spasial. Peningkatan ekonomi atau keuntungan

tersebut disebabkan oleh berkurangnya jarak tempuh dari pusat distribusi ke pasar.

3. Biaya transportasi, yang pada poin ini sangat sulit untuk dilihat dikarenakan hal tersebut terkait dalam biaya yang dikeluarkan menuju kegiatan ekonomi dan terkait dengan jarak dan lokasi. Maka hal tersebut sangat perlu untuk dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan wilayah.

Pelaksanaan Otonomi daerah pada dasarnya ketika daerah harus mampu untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya secara optimal. Pelaksanaan eksplorasi sumber daya yang ada di daerah dapat diwujudkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada (Imamudin, 2012).

Namun dalam pelaksanaan pemekaran wilayah di Indonesia, masih banyak wilayah pemekaran belum mampu untuk mencapai tujuan dari pemekaran wilayah. Permasalahan yang muncul setelah dilaksanakannya pemekaran wilayah, ketika wilayah pemekaran tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan wilayah pemekaran belum mampu untuk mengelola segala potensi yang ada di daerah, baik itu dari segi sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya sebagai sumber pendapatan asli daerah (Simamora, 2013).

Permasalahan tersebut juga memicu terjadi buruknya pelayanan publik di daerah. Pemekaran wilayah juga menimbulkan konflik ruang antara wilayah induk dan wilayah pemekaran, konflik tersebut terjadi karena perebutan kepemilikan aset daerah. Belum mempunyai wilayah pemekaran untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah sebagai sumber pendapatan daerah semakin memberikan beban pada keuangan negara atau APBN untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Agustino, 2008).

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 32 Tahun 2004 ada beberapa syarat administratif yang harus dipenuhi untuk membentuk daerah otonomi baru, yaitu:

1. Syarat administratif, yaitu persetujuan dari DPRD masing-masing daerah serta rekomendasi menteri dalam negeri.
2. Syarat teknis yaitu kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan.
3. Syarat fisik paling sedikit lima Kabupaten atau Kota untuk membentuk Provinsi dan paling sedikit lima Kecamatan untuk pembentukan Kabupaten dan empat Kecamatan untuk pembentukan Kota. Lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintah.

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Jambi dengan luas $\pm 3,746.77$ km². Dan total penduduk sebanyak 322,322 jiwa. Dan dibagi menjadi 13 Kecamatan. Dengan luas, jumlah penduduk serta jumlah Kecamatan yang ada Kabupaten Kerinci memiliki potensi untuk dapat di mekarkan menjadi beberapa daerah baru. Hal tersebut diperlukan untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat, memaksimalkan pengembangan potensi yang ada pada wilayah serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan pada masyarakat.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 21 tahun 2005 dan juga memperhatikan tuntutan dari masyarakat maka disetujui untuk pelaksanaan pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kota Sungai Penuh. Kemudian juga di setujui oleh DPRD Kabupaten Kerinci dengan mengeluarkan keputusan No 09 Tahun 2006 tentang persetujuan pembentukan Kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, yang terdiri atas 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Pasisir Bukit, Kecamatan Tanah Kampung, dan Kecamatan Kumun Debai. Kota Sungai Penuh memiliki luas wilayah ± 391.5

km², dengan jumlah penduduk yang tercatat pada tahun 2007 adalah sebanyak $\pm 77,315$ jiwa.

Menurut Cahyadin (2006) sebelum dilaksanakannya pemekaran wilayah untuk mengurangi resiko wilayah pemekaran gagal untuk berkembang. Maka dibutuhkan beberapa pertimbangan sebelum dilaksanakan pemekaran wilayah diantaranya:

1. Pertimbangan fungsi wilayah digunakan untuk mengetahui tingkat keseimbangan antara pusat-pusat pelayanan yang ada dan distribusi penduduk di dalam masing-masing kecamatan pada wilayah administrasi suatu Kabupaten atau Kota.
2. Pertimbangan kriteria fisik atau lingkungan diperlukan untuk menilai potensi lahan dan ketersediaan sumber daya lahan dalam kaitannya terhadap pembagian wilayah pemekaran yang bertujuan agar masing-masing wilayah hasil pemekaran dapat tumbuh dan berkembang.
3. Pertimbangan kriteria ekonomi diperlukan untuk mengetahui potensi ekonomi masing-masing wilayah pemekaran.
4. Pertimbangan kriteria sosial diperlukan untuk mengetahui, interaksi, dan aktivitas masyarakat sosial budaya masyarakat.

Dengan adanya wilayah otonomi baru atau wilayah pemekaran maka akan menimbulkan dampak sebagai berikut:

1. Pelayanan publik akan mudah diakses oleh masyarakat, jadi pelayanan akan semakin dekat dengan masyarakat
2. Adanya peningkatan partisipasi aktif dan rasa memiliki oleh masyarakat.
3. Adanya efektivitas dan produktivitas oleh pemerintah daerah.
4. Pemekaran daerah secara tidak langsung akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
5. Dengan adanya pemekaran maka untuk mewujudkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dan kesetaraan hak masyarakat akan meningkat.

Semua faktor yang dikemukakan diatas sangat penting sebagai bahan pertimbangan bagi suatu daerah untuk membentuk daerah otonomi baru. Agar tujuan utama pemekaran wilayah untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Pada prinsipnya keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai dampak pemekaran daerah merupakan indikator sederhana untuk mengetahui seberapa jauh pemekaran menjadi solusi atau sebaliknya menjadi masalah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah. Sehingga tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pertimbangan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci.
2. Menganalisis pengaruh pemekaran Kota Sungai Penuh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi wilayah Kota Sungai Penuh.
3. Menganalisis dampak pemekaran Kota Sungai Penuh terhadap wilayah pinggiran Kota Sungai Penuh.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus ketika penelitian studi kasus berfokus pada spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu mencakup individu, kelompok, maupun potret kehidupan. (Creswell, 1998). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.

Untuk mencapai tujuan penelitian mengenai pertimbangan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci digunakan analisis kualitatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan Tim Pembentukan Kota Sungai Penuh dan Tokoh Masyarakat Adat Kota Sungai Penuh.

Untuk mencapai tujuan penelitian mengenai pengaruh pemekaran Kota Sungai Penuh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi wilayah digunakan analisis kuantitatif menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari rentang waktu tertentu yaitu dari Tahun 2010-2016. Analisis dilakukan dengan menggunakan rumus *Rate of Growth* untuk mengukur pertumbuhan, yaitu:

$$Pt = Po (1 + r)^t$$

keterangan:

Pt = PDRB pada Tahun t

Po = PDRB pada Tahun awal

r = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (*Rate of Growth*)

t = Jarak Periode

Untuk mencapai tujuan penelitian mengenai dampak pemekaran Kota Sungai Penuh terhadap wilayah pinggiran Kota Sungai Penuh digunakan analisis secara kualitatif dengan menggunakan data berupa hasil wawancara dengan Kepala Desa, Masyarakat Desa yang ada di wilayah pinggiran Kota Sungai Penuh yaitu Desa Talang Lindung, Desa Sungai Ning dan Desa Sungai Jernih untuk mengetahui bagaimana dampak pemekaran terhadap wilayah pinggiran Kota Sungai Penuh dalam pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah pada bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang pertanian, peternakan. Variabel yang dapat menjawab tujuan penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Variabel penelitian

No	Variabel	Indikator
1	Aspek Pertimbangan Pemekaran	Pertimbangan Fungsi Pertimbangan Kriteria Fisik Pertimbangan Kriteria Ekonomi Pertimbangan Kriteria Sosial
2	Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Potensi Wilayah	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pengembangan wilayah berbasis sumberdaya Pengembangan wilayah berbasis Tata ruang
3	Dampak Pemekaran dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, Pertanian dan Peternakan	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kemudahan Akses Pembinaan Pelayanan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci

Ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan sebelum dilaksanakannya suatu pemekaran daerah baik itu dari pertimbangan pemerintah dan pertimbangan masyarakat, jika dilihat dalam pelaksanaan pemekaran daerah Kota Sungai Penuh, maka dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pertimbangan fungsi wilayah

Pertimbangan fungsi wilayah adalah keseimbangan antara distribusi penduduk dan pusat-pusat pelayanan yang ada pada suatu daerah. Sebelum dilaksanakannya pemekaran wilayah Kabupaten/Kota harus memperhatikan jumlah Kecamatan yang ada di wilayah pemekaran yang disesuaikan dengan distribusi penduduk di dalam wilayah pemekaran, hal tersebut sesuai dengan UU No 32 tahun 2004 pasal 5, yang mana dalam pembentukan Kota/Kabupaten minimal harus memiliki 5 Kecamatan.

Tabel 2. Pembagian wilayah Kota Sungai Penuh pada awal pembentukan.

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah	%
1	Kec. Tanah Kampung	13	-	1,200	2.84
2	Kec. Sungai Penuh	15	4	20,625	52.45
3	Kec. Hamparan Rawang	13	-	1,235	3.15
4	Kec. Pesisir Bukit	15	-	2,120	5.49
5	Kec. Kumun Debai	9	-	14,300	36.37
	Jumlah	65	4	39,150	100.00

Sumber: BPS Kota Sungai Penuh (2008)

Pada awal pembentukan Kota Sungai Penuh terdiri dari 5 Kecamatan dengan 4 Kelurahan dan 65 Desa. Wilayah yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sungai Penuh dengan luas wilayah lebih kurang 20,625 Ha dengan persentase sebesar 52.45% dari luas total Kota Sungai Penuh. Dan wilayah yang memiliki luas paling sedikit adalah Kecamatan Tanah Kampung dengan luas lebih kurang 1,200 Ha dengan persentase 2.84% dari luas total Kota Sungai Penuh.

Pelaksanaan pemerintahan di Kota Sungai Penuh, pada tingkat terendah terdiri dari Desa dan Kelurahan. Keberadaan Desa dan Kelurahan di Kota Sungai Penuh sebagai pemerintahan terendah di daerah memiliki status setara. Sebenarnya dalam Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa bersama masyarakat desa memiliki hak untuk mengubah status desa menjadi kelurahan sesuai dengan prakarsa pemerintah desa dan masyarakat yang ada di desa

2. Pertimbangan fisik

Pertimbangan fisik merupakan salah satu pertimbangan dalam pembentukan wilayah baru atau pemekaran suatu wilayah, kriteria pertimbangan fisik ketika harus adanya ketersediaan lahan untuk pelaksanaan proses pembangunan. Ketersediaan lahan di Kota Sungai Penuh bukan hanya digunakan untuk kawasan perkotaan tetapi juga diperuntukkan sebagai lahan pertanian, dan yang dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3 Penggunaan Lahan Kota Sungai Penuh dalam (Ha)

Penggunaan Lahan	Kec.Hamparan Rawang	Kec.Kumun Debai	Kec.Pesisir Bukit	Kec.Sungai Penuh	Kec.Tanah Kampung
Hutan Primer	-	11,032	379	11,767	-
Hutan Sekunder	-	666	837	6,384	-
Kebun Campuran	-	1,218	-	695	38
Pemukiman	150	128	144	346	147
Pertanian Basah	287	3	-	53	51
Pertanian Kering	-	70	394	576	3
Rawa	127	-	-	-	3
Sawah	651	505	350	619	858
Semak Belukar	-	568	5	83	-
Tanah Terbuka	-	9	1	2	-
Luas	1,215	14,200	2,110	20,525	1,100

Sumber: Bappeda Kota Sungai Penuh (2008)

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan luas lahan terbesar berada di Kecamatan Sungai Penuh yaitu 20,525 ha. Pelaksanaan pembangunan sarana prasana pemerintahan seperti perkantoran, dan pasar induk semuanya terpusat di Kecamatan Sungai Penuh.

4. Pertimbangan sosial budaya

Pertimbangan Sosial Budaya adalah aspek pertimbangan keadaan masyarakat yang dilihat dari bagaimana interaksi dan keadaan sosial masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pemekaran daerah. Hal tersebut diharapkan bahwa pemekaran wilayah merupakan tuntutan dari masyarakat untuk dimekarkannya suatu wilayah dari wilayah induk dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pertimbangan sosial masyarakat dalam pelaksanaan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci, ide utama pembentukan Kota Sungai Penuh berasal dari Bupati Kerinci Bapak H. Fauzi Siin, kemudian ide pembentukan Kota Sungai Penuh tersebut didukung oleh masyarakat Kota Sungai dan Kabupaten Kerinci dengan menandatangani surat persetujuan pembentukan Kota Sungai Penuh.

Keterwakilan beberapa lembaga masyarakat yang memberikan persetujuan pembentukan Kota Sungai Penuh, merupakan orang empat jenis yang di dalam masyarakat adat kerinci, orang empat jenis adalah orang

yang dijadikan panutan atau pemimpin di dalam masyarakat yang terdiri dari Adat, Cendekiawan, Ulama dan Pemuda. Maka keterwakilan orang empat jenis tersebut di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dianggap sudah mewakili seluruh suara dan keinginan masyarakat yang ada.

Pengaruh pemekaran Kota Sungai Penuh terhadap pertumbuhan dan pengembangan potensi wilayah Kota Sungai Penuh

Agar dapat mengetahui bagaimana kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat digunakan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang digunakan sebagai alat analisis utama untuk mendapatkan bagaimana keadaan ekonomi Kota Sungai Penuh pada waktu tertentu atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga konstan. Apabila dihitung laju pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh menggunakan data PDRB dari Tahun 2010-2016 dengan menggunakan Rumus *Rate Of Growth*, maka di dapatkan:

$$r = \sqrt[6]{\frac{3946467.11}{2592925.19}} - 1$$

$$= 0.00313$$

$$= 3.13 \%$$

Berdasarkan hasil tersebut didapatkan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi pada Kota Sungai Penuh dari rentang tahun 2010 hingga 2016 sebesar 3.13%.

Tabel 4 Pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh dari tahun 2010-2016

PDRB	Jumlah	Pertumbuhan (r%)
2010	2,592,925.19	-
2011	2,770,910.54	6.86%
2012	2,967,371.60	7.09%
2013	3,218,243.48	8.45%
2014	3,460,943.21	7.54%
2015	3,705,362.24	7.06%
2016	3,946,467.11	6.50%
Pertumbuhan PDRB dari rentang 2010-2016		3.13 %

Sumber: BPS Kota Sungai Penuh (2018)

Apabila pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh sebesar 3.13% dianalisis dengan teori proses pembangunan menurut Rostow. Pembangunan Kota Sungai Penuh berada pada tahap Pra kondisi tinggal landas ketika masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri, pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis. Pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh sudah terjadi namun relatif lambat.

Untuk lebih menguatkan data pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maka dibutuhkan data pendukung berupa Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut dibutuhkan untuk melihat perkembangan aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Berikut dapat dilihat data pertumbuhan IPM Kota Sungai Penuh dan wilayah induk Kabupaten Kerinci.

Tabel 5 Indeks pembangunan manusia Kota Sungai Penuh tahun 2010-2016

IPM (Tahun)	Angka	Kategori
2010	69.91	Tinggi
2011	70.55	Tinggi
2012	71.23	Tinggi
2013	72.09	Tinggi
2014	72.48	Tinggi
2015	73.03	Tinggi
2016	73.35	Tinggi
Pertumbuhan IPM dari Tahun 2010-2016		2.56%

Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat bahwa dari rentang waktu tahun 2010-2016 tingkat pembangunan manusia yang ada di Kota Sungai Penuh berada pada kategori tinggi yaitu diatas angka 64. Maka didapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Sungai Penuh diikuti dengan pertumbuhan pembangunan manusianya.

Wilayah pemekaran atau wilayah otonomi baru diharapkan mampu untuk mengembangkan segala potensi yang ada di daerah sebagai sumber pendapatan guna pelaksanaan pembangunan daerah. Berdasarkan visi dan misi Kota Sungai Penuh sebagai pusat perdagangan dan pendidikan. Kota Sungai Penuh telah merujuk sektor pendidikan dan sektor perdagangan besar dan eceran sebagai sektor basis atau dikategorikan sebagai sektor maju dan tumbuh pesat.

Tabel 6 Pendapatan asli daerah Kota Sungai Penuh tahun 2010-2016

Tahun	Pajak daerah	Retribusi	Lain-lain PAD yang sah	Pengelolaan kekayaan yg dipisahkan
2010	2,378,445,724.87	1,791,474,285.00	4,120,035,365.08	-
2011	2,809,780,700.00	1,234,554,360.00	10,302,798,109.74	10,712,398.16
2012	4,204,329,060.00	2,133,549,646.00	11,148,226,490.90	2,207,696,864.64
2013	4,466,398,153.00	2,385,188,827.00	11,551,856,104.97	5,863,221,786.06
2014	5,400,206,843.30	2,574,384,763.00	16,783,799,810.00	8,441,466,802.00
2015	5,657,521,743.00	2,216,227,576.00	20,058,980,104.66	8,314,202,410.18
2016	6,291,629,478.00	2,950,566,253.00	20,095,567,670.18	7,294,713,593.15
(r%)	9.3%	3.21%	23.3%	33.42%

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh (2018)

Berdasarkan analisis menggunakan data PDRB dan PAD Kota Sungai Penuh dari tahun 2010-2016 maka di dapatkan hasil bahwa dalam rangka pengembangan Kota Sungai Penuh

terdapat tiga sektor potensial dengan tingkat pertumbuhan lebih tinggi dari pada sektor lainnya yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi transportasi dan sektor

perdagangan serta komunikasi dan informasi. Hal tersebut berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah setiap tahunnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Sebagai data pembandingan antara wilayah pemekaran Kota Sungai Penuh dengan Wilayah Induk Kabupaten Kerinci agar terlihat apakah terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi wilayah induk Kabupaten Kerinci dengan wilayah Pemekaran Kota Sungai Penuh serta untuk dapat melihat sektor yang mendominasi sebagai sumber PDRB masing-masing wilayah dapat dilihat pada Tabel 7.

Berdasarkan data Tabel 7 dapat dilihat perbandingan pertumbuhan ekonomi melalui Produk Domestik Regional Bruto antara wilayah induk Kabupaten Kerinci dengan wilayah Pemekaran Kota Sungai Penuh. Pada tahun 2010 PDRB Kota Sungai Penuh Rp 2,592,925 miliar, pada tahun yang sama PDRB wilayah induk Kabupaten Kerinci Rp 3,639,538 miliar.

Tabel 7 Perbandingan PDRB wilayah induk Kabupaten Kerinci dengan wilayah pemekaran Kota Sungai Penuh.

Tahun	Kota Sungai Penuh	Kabupaten Kerinci
2010	2,592,925.19	3,639,538.40
2011	2,770,910.54	3,865,496.20
2012	2,967,371.60	4,155,505.90
2013	3,218,243.48	4,411,405.90
2014	3,460,943.21	4,811,384.40
2015	3,705,362.24	5,120,000.40
2016	3,946,467.11	5,463,047.60
r (%)	3.13%	3.23%

Setiap tahunnya terjadi pertumbuhan ekonomi dengan ditandai peningkatan PDRB pada kedua wilayah. Hingga pada tahun 2016 PDRB Kota Sungai Penuh Rp 3,946,467 dan Kabupaten Kerinci sebesar Rp 5,463,047 miliar. Pertumbuhan ekonomi wilayah induk Kabupaten Kerinci dan wilayah pemekaran Kota Sungai Penuh tidak jauh berbeda walaupun pertumbuhan ekonomi yang terjadi lebih tinggi pada wilayah induk Kabupaten Kerinci yaitu 3.23%.

Jika dilihat dari sektor sumber pendapatan Produk Domestik Regional Bruto, antara wilayah induk Kabupaten Kerinci dan wilayah pemekaran Kota Sungai Penuh, maka dapat dilihat pada Tabel 8.

Berdasarkan data perbandingan sektor usaha sebagai sumber Produk Domestik Regional Bruto antara wilayah induk Kabupaten Kerinci dengan wilayah pemekaran Kota Sungai Penuh, didapatkan bahwa, sektor pertanian mendominasi PDRB wilayah Induk Kabupaten Kerinci yaitu Rp 16,337,380 miliar atau 51.8% dari PDRB total, sedangkan untuk wilayah pemekaran Kota Sungai Penuh sektor pertanian hanya menghasilkan sebesar Rp 1,425,164 miliar atau 6.2%.

Untuk wilayah pemekaran Kota Sungai Penuh, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran yaitu Rp 5,566,699 miliar atau 24.56%, sedangkan untuk di wilayah induk Kabupaten Kerinci sektor perdagangan besar dan eceran hanya berkontribusi sebesar Rp. 2,973,584 miliar atau 9.4%.

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi perdagangan atau jasa.

Apabila dianalisis dengan wilayah pemekaran Kota Sungai Penuh dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didominasi oleh sektor perdagangan sebesar Rp 5,566,699 miliar atau 24.56% dari PDRB total Kota Sungai Penuh dari tahun 2010-2016, maka Kota Sungai Penuh dapat dikategorikan sebagai sebuah kota dengan sektor utama yaitu perdagangan.

Berdasarkan gambar pada peta ruang Kota Sungai Penuh di atas dapat dilihat wilayah perkotaan ditandai dengan garis berwarna ungu yang membentuk pola ruang perkotaan, kemudian yang berwarna ungu merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang berada di wilayah pinggiran Kota Sungai Penuh, serta lokasi Desa yang ada di pinggiran Kota Sungai Penuh dan berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat dapat dilihat pada Gambar 1 di atas.

Di Kota Sungai Penuh terdapat Kelurahan dan Desa sebagai Struktur pemerintahan terendah. Dalam melihat dampak pemekaran terhadap wilayah pinggiran Kota Sungai Penuh dilihat dalam pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah diantaranya bidang pendidikan dan bidang kesehatan, kemudian ditambah dengan bidang pertanian dan peternakan karena ditinjau dari topografi wilayah desa yang ada dipinggiran Kota Sungai Penuh dan berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat mayoritas masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian dan peternakan. Tiga desa tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9 Desa pinggiran Kota Sungai Penuh

Desa	Jumlah Penduduk
Desa Talang Lindung	1,481
Desa Sungai Jernih	975
Desa Sungai Ning	921

Sumber: BPS Kota Sungai Penuh (2018)

1. Bidang Pendidikan

Pada wilayah pinggiran Kota Sungai Penuh, pelaksanaan pembangunan dalam bidang pendidikan dirasakan oleh masyarakat dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang mana pada setiap desa telah di sediakan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah mulai dari jenjang PAUD, TK, dan Sekolah Dasar.

Dalam hal pembangunan PAUD dikelola oleh pemerintah Desa dan dibangun oleh Pemerintah Desa menggunakan Dana Desa. Pembangunan sarana dan prasarana sekolah pada setiap desa memberikan kemudahan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan

pelayanan pendidikan. Walaupun masih ada beberapa masyarakat desa yang tidak menyekolahkan anak mereka pada sekolah yang berada di desa karena alasan kualitas perkembangan anak. Berikut dapat dilihat data ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan pada 3 desa tersebut, diantaranya:

Tabel 10 Sarana pendidikan Desa Talang Lindung

No	Nama	Jumlah	Status Kepemilikan	Guru	Siswa
1	Paud	1	Desa	4	35
2	SD	1	Negara	30	60
3	MIS	1	Swasta	22	56
4	TPQ	1	Desa	4	150

Sumber: Pemerintah Desa Talang Lindung(2018)

Tabel 11 Sarana pendidikan Desa Sungai Jernih

No	Nama	Jumlah	Status Kepemilikan	Guru	Siswa
1	Paud	1	Desa	5	27
2	SD	1	Negara	28	65
3	MIS	1	Swasta	3	31
4	TPQ	0	-	-	-

Sumber: Pemerintah Desa Sungai Jernih (2018)

Tabel 12 Sarana pendidikan Desa Sungai Ning

No	Nama	Jumlah	Status Kepemilikan	Guru	Siswa
1	Paud	3	Desa	16	112
2	SD	1	Negara	28	78
3	MIS	0	-	-	-
4	TPQ	0	-	-	-

Sumber: Pemerintah Desa Sungai Ning (2018)

Berdasarkan data sarana prasarana pendidikan yang ada di Desa Talang Lindung, Desa Sungai Jernih dan Desa Sungai Ning didapatkan hasil bahwa sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat telah tersedia dari tingkat PAUD, Sekolah Dasar, dan MIS. Namun jumlah siswa yang ada di setiap sekolah sangat sedikit.

2. Bidang Kesehatan

Agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Sungai Penuh dapat dilakukan secara maksimal, maka pemerintah Kota Sungai Penuh harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta tenaga medis yang profesional dan handal untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada

setiap desa di wilayah Kota Sungai Penuh memiliki Puskesmas Pembantu untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat desa.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada Desa Talang Lindung, Sungai Ning dan Sungai Jernih pemerintah Kota Sungai Penuh membangun sarana kesehatan berupa puskesmas Kecamatan yang berlokasi di Desa Talang Lindung. Dengan tenaga medis sebagai berikut:

Tabel 13 Tenaga medis Puskesmas Kecamatan Sungai Bungkal

No	Tenaga Medis	Jumlah
1	Dokter	1
2	Dokter Gigi	0
3	SKM	1
4	Perawat	5
5	Perawat Gigi	0
6	Bidan	1
7	Farmasi	1

Sumber: Puskesmas Kec.Sungai Bungkal (2018)

Berdasarkan data di atas didapatkan hasil penelitian bahwa fasilitas kesehatan sudah tersedia namun dari segi sumber daya masih kekurangan, ketika dokter gigi dan perawat gigi masih belum ada. Permasalahan lain yang terjadi ketika akses masyarakat menuju puskesmas sering terkendala dikarenakan masalah sulitnya mendapatkan transportasi umum walaupun akses jalan sudah ada. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan data kunjungan pasien puskesmas Kecamatan Sungai Bungkal dalam 3 bulan terakhir tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 14 Kunjungan pasien Puskesmas Kecamatan Sungai Bungkal 3 bulan terakhir tahun 2018

No	Pasien	Jumlah
1	Laki-Laki	121
2	Perempuan	471
3	Total	592

Sumber: Puskesmas Kec.Sungai Bungkal (2018)

Berdasarkan data di atas didapatkan bahwa jumlah pasien yang berobat ke puskesmas Kecamatan yang berada di Desa Talang Lindung sangat sedikit, hal tersebut bukan dikarenakan tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi, namun dikarenakan

akses masyarakat menuju puskesmas terbatas, dikarenakan sulitnya mendapatkan transportasi umum. Namun untuk mengatasi permasalahan tersebut puskesmas mengadakan puskesmas keliling secara bergantian mendatangi setiap desa untuk melakukan pengecekan kesehatan masyarakat.

3. Bidang pertanian dan peternakan

Wilayah pinggiran Kota Sungai Penuh yang terdiri dari Desa Talang Lindung, Desa Sungai Jernih dan Desa Sungai Ning merupakan wilayah dengan topografi perbukitan dan di dominasi oleh sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakatnya. Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Sungai Penuh memberikan bantuan kepada petani yang ada di desa dengan proses membentuk kelompok-kelompok tani yang terdiri dari beberapa petani yang ada di desa kemudian diberikan penyuluhan tentang bagaimana cara bertani yang lebih baik serta diberikan bantuan bibit pertanian, pupuk dan alat-alat pertanian dengan cara mengajukan proposal melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Sungai Penuh.

Untuk pemasaran hasil pertanian BUMDES Desa Talang Lindung telah mendirikan pasar mingguan dengan hasil komoditi utama yaitu sayuran, buah, dan daging. Dengan dibangunnya pasar mingguan di Desa Talang Lindung memudahkan masyarakat untuk dapat menjual hasil pertanian selain harus dijual kepasar induk yang ada di Pasar Kota Sungai Penuh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan sebelum dibentuknya Kota Sungai Penuh diantaranya pertimbangan fisik, pertimbangan fungsi wilayah, pertimbangan ekonomi dan pertimbangan sosial budaya.
2. Pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh dari Tahun 2010-2016 yang dihitung menggunakan PDRB mengalami

pertumbuhan sebesar 3.13% setiap tahun. Kota Sungai Penuh memiliki potensi pada sektor perdagangan yang dapat dikembangkan. Pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh juga disertai dengan pertumbuhan IPM yang berada pada kategori tinggi yaitu diatas angka 64.

3. Dampak pemekaran terhadap wilayah pinggiran Kota Sungai Penuh yaitu Desa Talang Lindung, Desa Sungai Jernih dan Desa Sungai Ning. Pada bidang pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar berupa PAUD dan SD, pada bidang kesehatan berupa pembangunan puskesmas Kecamatan pada wilayah desa talang lindung untuk membantu puskesmas pembantu yang ada pada masing - masing desa, pada bidang pertanian dan peternakan pembangunan berupa pembentukan dan pembinaan kelompok tani serta penyediaan bibit dan alat-alat pertanian melalui Dinas Pertanian Kota Sungai Penuh.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, untuk mewujudkan wilayah pemekaran yang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

1. Kota Sungai Penuh memiliki sektor perdagangan dan jasa yang potensial dikembangkan ke depannya dengan dikembangkannya sektor tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Dalam hal percepatan pelayanan Kota Sungai Penuh harus memperhatikan kembali rentang jarak bagi masyarakat yang berada di pinggiran Kota Sungai Penuh untuk mendapatkan pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). Proliferasi Dan Etno Nasionalisme Dari Pada Pemberdayaan Dalam Pemekaran Daerah di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Organisasi*, 15 (3), 196-201.
- Arianti, N. N. (2016). Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Agrisepe*, 16 (1), 30-31.
- Arrafat, M. (2011). *Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Daerah Studi Kasus Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat*. Tesis. Institut Pertanian Bogor.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Tradition*. London: Sage Publications
- Hakim, A. (2017). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal JOMFekon.*, 4 (1), 844-845.
- Harmantyo, D. (2007). Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan. *Jurnal Makara, Sains*, 11 (1), 16-22.
- Khairullah. & Cahyadin, M. (2006). Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia Studi Kasus Kabupaten Lahat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11 (3), 261-277.
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia Konsep Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10 (2), 288-289.
- Nugroh, I., & Dahuri, R (2004). *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. LP3ES.
- Poerwadarminta. (2005). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Polakitang, R. (2013). Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Eksekutif*, 2 (1), 2-3.

- Riani, I. A. P. & Pudjihardjo, M. (2012). Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap PendapatanPerkapita, Kemiskinan, Dan Ketimpangan Antar Wilayah di Provinsi Papua. *Jurnal Bumi Lestari*, 12 (1), 137-148.
- Simamora, R. & Halim, A. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13 (2), 29-43.
- Trisnawati, D. (2015). *Pemekaran Daerah Di Kabupaten Bintan*. Tesis. Umrah Tanjung Pinang.
- Yuliadi, I. (2012). Kesenjangan Investasi Dan Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 13 (2), 276-287.